NAMA: AHMAD RIFALDI RUSLAN

KELAS : HTN E

NIM : 10200120178

RESUME JURNAL PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

Partai politik

politik merupakan pencerminan dari Negara yang demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan Negara modern. Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politik merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Jika hal ini juga dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai artikulasi kepentingan, agresi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti sudah bisa kita dengar diberbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.¹

Secara etimologi politik berasal dari kata polis (yunani) yang berarti kota atau Negara kota. Kemudian diturunkan kata kata polities yang berarti warga Negara. Politike te ckne' berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideology.²

Orang pertama yang memperkenalkan kata *politik* adalah aristoteles oleh³ pemangkatannya tentang "manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik". Ia menjelaskan hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan partai politik. Dalam arti luas setiap

¹ Jurnal ilmiah ellya rosana "partai politik dan pembangunan politik" hal 1

² soelist ismail Gani, pengantar ilmu politik, (Jakarta : Ghalia indonesia, 1984)h. 14

³. Aristoteles (384-322 s.m) dipandang sebagai bapak *ilmu politik* dan plato (427-347 S.M.) sebagai bapak *filisfat politik*, sekurang kurangnya di brat, keduanya memndng negara dari persepektif filosof yang melihat semua pengetahuan merupakan suatu kestuan yang utuh. Lihat: Carlton Claymer Rodee dkk., *introduction to political Science*, terj. Zulkifly Hamid, *pengantar ilmu politik*, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2000, hlm. 6

orang politisi. Dalam hal ini memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentui tujuan kolektif-negara. Karena itu semua orang politisi, meski sebbagaian (pejabat Negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila dibandingkan dengan yang lainnya.

Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisis yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai nilai dan cita cita yang Sama⁴. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan kebijakan mereka

Pembangunan politik

umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bagi penganut pandangan ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia. Dalam pengertian seperti ini, teori pembangunan berarti teori sosial ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menjadi pandangan yang menguasai hamper setiap dirkursus mengenai sosial.⁵

Sementara itu, di pihak terdapat sesuatu pandangan leboh minorits yang berangkat dari asumsi bahwa kata “pembangunan” itu sendiri adalah sebuah discourse, Suatu ideologi dan teori tentang perubahan sosial. Dalam pandangan ini konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu aliran dan keyakinan ideologis dan teoris serta praktik mengenai perubahan sosial.⁶

Jika dilihat lebih secara lebih mendalam dari pengertian dasarnya, pembangunan merupakan suatu ilmiah yang dipakai dalam bermacam macam konteks, dan seringkali digunakan dalam konteks politik dan ideologi tertentu. Ada banyak kata yang mempunyai persamaan makna dengan kata pembangunan, misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, progress, dan modernisasi. Dari kata kata tersebut hanya perubahan sosial yang memberi makna perubahan ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu yang menggunakannya dan

⁴ Mirim Budaiarjo, *OP. Cit.* h. 160-161

⁵ Mansour Fakhri, *runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi.* (Yogyakarta : insis press, 2009), h. 8-9

⁶ *Ibid*

untuk kepentingan apa. Dalam konteks pembangunan politik, pendidikan nasional selalu diinikasikan memiliki dua sisi, keharusan untuk melaksanakan pendidikan nasional secara merata dan berkeseimbangan memang perlu dilakukan, setidaknya agar setiap lapisan masyarakat (terutama di Negara berkembang seperti Indonesia) menjadi lebih sadar politik, sadar hukum, serta sadar lingkungan dalam arti seluas luasnya.

Tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia ialah untuk membentuk manusia susila yang cakap, dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat di tanah air berdasarkan asas Pancasila dan UUD 1945⁷. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional kita tersebut diatas, maka tujuan pendidikan politik di Indonesia adalah⁸;

- Menampilkan peranan insan/humani setiap individu yang unik selaku warga Negara, dengan jalan mengembangkan potensi dan bakat kemampuan semaksimal mungkin.
- Agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun bangsa dan Negara.

Masih dalam konteks pembangunan politik, bahwa pendidikan nasional apalagi dalam sub sektor pendidikan tinggi, mau tidak mau harus dijadikan sarana strategis bagi kaderisasi pemimpin bangsa, karena dari tempat itulah sosok pemikir kemajuan bangsa dan Negara dapat diharapkan muncul, terutama pada era komunikasi global yang menuntut daya saing yang amat ketat dan multidisipliner. Sekarang bukanlah era yang pantas mengharap pemimpin bangsa turun dari partaian dan menanamkan dirinya sebagai ratu adil, melainkan saatnya memacu keterbukaan akal dan ketakwaan yang kompetitif untuk memajukan bangsa dan Negara ditengah peradaban global yang tak lagi dapat dimanipulasi hanya oleh kekuasaan formal yang sifatnya sesaat.

Pembangunan politik bukanlah sekedar perubahan politik, melainkan pengembangan kesadaran politik masyarakat secara berkeseimbangan dan berkeadilan. Artinya jika pendidikan nasional harus juga mengemban misi pembangunan politik, maka ia harus juga memajukan semua orang, meningkatkan kesadaran hak dan tanggung jawab politik mereka, meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan tentu saja juga harus melengkapi prediksi mereka sebagai manusia seutunya. Pendidikan nasional dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan untuk memajukan kemanusiaan, juga bukan sekedar kecerdasan untuk membohi sesama.⁹

⁷ Firmanzah, pengelola partai politik (Jakarta : Yayaawan obor Indonesia, 2008), h.75

⁸ *Ibid.*, h. 82

⁹ Tulus Warsito, *OP. Cit.* h.6

Fungsi partai politik

Fungsi utama dan pertama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideology tertentu. Adapun cara yang digunakan oleh suatu partai politik demokrasi dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Partai politik baik dalam sistem politik apapun, apalagi sistem politik demokrasi, ia pasti harus melaksanakan sejumlah fungsi, di antaranya.¹⁰

Sosialisasi politik

Yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup, baik diperoleh secara sengaja (pendidikan formal, non formal, informal) maupun secara tidak sengaja (pengalaman sehari-hari dalam keluarga, teman bermain, tetangga, dalam kehidupan bermasyarakat).

Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada warga masyarakat, dan dari warga masyarakat kepada pemerintah. Dalam konteks ini partai politik berfungsi sebagai komunikator politik, tidak terbatas menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada warga masyarakat tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduanya dilaksanakan oleh partai politik dalam sistem politik demokrasi.

Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik (*public policy*) dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan melalui sesuatu pemilihan umum yang teratur dan demokratis. Kegiatan dimaksud di antaranya mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan pemimpin, dan mendukung calon pemimpin. Partai politik juga membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Dengan demikian, partai politik merupakan wadah partisipasi politik.

¹⁰ Ramlah Surbakti, *Memahami ilmu politik*, 1992, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 116-121.

Pemilihan umum

Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislative di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.¹¹

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Menurut UU No.7 pasal 348-350 tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin.¹²

Dalam pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi tiga kategori pemilih. Kategori pemilih tersebut ialah **pemilih tetap**, **pemilih tambahan** dan **pemilih khusus**. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu.

Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah di cokolit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6.

Pemilih tambahan, adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut UU NO.7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM).

Pemilih Khusus, adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa

¹¹ Arifin, Anwar. *Pencitraan dalam politik*, (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006) hal.39

¹² Putra, Dwi (2019). *Buku saku sanksi peserta pemilu tahun 2019*. Jakarta pusat: Badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia hlm. 1.

KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.¹³

Sistem pemilihan umum

Berdasarkan daftar peserta partai politik

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu

1. sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik.
2. sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.

Berdasarkan perhitungan¹⁴¹⁵

Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu

1. sistem distrik (*plurality system*), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya:
 1. Mayoritas multak (*First Past The Post/FPTP*)
 2. Suara alternatif (*Alternative Vote/AV*)
 3. Suara blok (*Block Vote/BV*)
 4. Sistem dua putaran (*Two Round System/TRS*)
2. sistem semi proporsional (*semi proportional system*), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:
 1. Suara non dipindahtangankan tunggal (*Single Non Transferable Vote/SNTV*)
 2. Sistem paralel (*Parallel system*)
 3. Suara terbatas (*Limited vote*)
 4. Suara kumulatif (*Cumulative vote*)
3. Sistem semi proporsional (*proportional system*), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:
 1. Suara dipindahtangankan tunggal (*Single Transferable Vote/STV*)
 2. Perwakilan proporsional (*Proportional Representative/PR*)
 1. Rata-rata tertinggi/Divisor (*Highest average*)
 2. Suara sisa terbanyak/Kuota (*Largest remainder*)
 3. Daftar partai (*Party-list*)
 1. Daftar terbuka (*Open-list*)
 2. Daftar tertutup (*Close-list*)
 3. Daftar lokal (*Local-list*)
 4. Anggota proporsional campuran (*Mixed Member Proportional/MMP*)

¹³ Putra, Dwi (2019). Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019. Jakarta: BAWASLU RI. Hlm. 1-3.

¹⁴ Perbedaan sistem distrik dan proporsional

¹⁵ Jidil2

Alasan dan fungsi pemilu

Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun tidak semua pemilihan demokratis.

Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni;

- Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapati melalui pemilu yang fair
- Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi dalam proses pemilu diselesaikan melalui lembaga – lembaga demokrasi

Pemilu sebenarnya memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah
- Pembentukan perwakilan politik rakyat
- Sirkulasi elite penguasa
- Pendidikan politik

Dalam pelaksanaan pemilu memiliki lima tujuan, yaitu:

- Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat
- Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik
- Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional
- Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi
- Pemilu sebagai sarana partisipasi politik¹⁶

¹⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/11000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan>